



KOTA YOGYA SISAKAN 1.927 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Perbaikan Ditargetkan Tuntas 2021

UMBULHARJO (MERAPI) - Sampai kini Kota Yogyakarta masih menyisakan sekitar 1.927 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ditargetkan perbaikan seluruh RTLH tersebut selesai pada tahun 2021. Pada 2019 sendiri ada 633 RTLH di Kota Yogyakarta yang akan diperbaiki dengan bantuan dana pemerintah pusat dan daerah.

"Data itu berdasarkan database tahun 2015 yang belum terverifikasi. Kemungkinan ada yang sudah diperbaiki secara mandiri atau dijual pemiliknya, sehingga jumlah RTLH yang belum tertangani bisa kurang dari angka itu," kata Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi Hapsari, Jumat (25/1).

Dia menjelaskan perbaikan RTLH tahun 2019 dengan APBN ditangani dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan DIY melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Untuk DAK akan ditangani 178 RTLH wilayah Kelurahan Suryatmajan, Keparakan, Gunungketur, Cokrodiran dan Klitren. Sedangkan melalui program BSPS dengan SNVT akan diperbaiki 160 RTLH di wilayah Kelurahan Suryodiningrat, Panembahan, Tegalpanggung, Purwokinan dan Bener.

Dia menyatakan skema pelaksanaan perbaikan RTLH dengan dana APBN berbeda dengan APBD. Besaran bantuan dari APBN untuk penanganan RTLH se-

nilai Rp 17,5 juta/rumah. "Dari APBN, bantuan akan langsung cair ke masyarakat berupa bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya masyarakat akan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya," terangnya.

Untuk penanganan melalui APBD tahun 2019 ada 229 RTLH dan rumah terdampak pembangunan infrastruktur yang tersebar di Kelurahan Patehan, Brontokusuman, Warungboto, Kotabaru, Bausaran, Sosromenduran, Muja-muja, Giwangan, Prenggan, Klitren dan Tegalarjo. Selain itu perbaikan 66 RTLH melalui APBD provinsi di wilayah Kecamatan Ngampilan. Besaran bantuan perbaikan RTLH sebanyak Rp 15 juta/rumah.

Dia menyampaikan perbaikan RTLH melalui APBD akan dilaksanakan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Skema pencairan dan perbaikan RTLH dari APBD dibagi menjadi tiga termin dalam satu tahun anggaran.

Selain itu ada sejumlah RTLH yang diperbaiki melalui program *corporate social responsibility* (CSR) pihak swasta. Dia menyebut data perbaikan RTLH melalui program CSR itu sebagian sudah masuk data base Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dan sebagian merupakan data baru. "Dengan banyaknya dana untuk menangani RTLH, kami berharap bisa tuntas di 2021," ujar Yunita.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Budi mengatakan sesuai permintaan badan anggaran DPRD Kota Yogyakarta dalam rapat November 2018, Pemkot Yogyakarta harus menyelesaikan perbaikan RTLH maksimal tahun 2021. Perbaikan RTLH itu merupakan bagian dari jaminan papan bagi keluarga miskin di Kota Yogyakarta. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2.			
3.			
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005